

ISSN 2828-285x



POLICY BRIEF

**PERTANIAN, KELAUTAN, DAN
BIOSAINS TROPIKA**
Vol. 5 No. 3 Tahun 2023

Determinan Proporsi Pembiayaan Modal Kerja
Sektor UMKM oleh Bank Syariah di Indonesia

Penulis

Diva Athaya Fairuz Siradju , Neneng Hasanah , Marhamah Muthohharoh

Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Manajemen, IPB University

Ringkasan

Isu Kunci

1. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki kontribusi dan peranan yang penting untuk meningkatkan pembangunan ekonomi nasional di Indonesia.
2. UMKM memiliki pengaruh dalam menyerap tenaga kerja dan menyumbang pendapatan nasional.
3. UMKM memiliki permasalahan dalam perkembangannya.
4. Permasalahan yang dijumpai pada setiap daerah serupa, yaitu modal kerja yang kurang memadai, kualitas sumber daya manusia yang kurang baik, produktivitas dan kualitas produk yang rendah, serta pengetahuan yang juga terbatas.

Rekomendasi

1. BSI sebagai perbankan syariah harus mengatasi keterbatasan modal kerja UMKM, yaitu dengan memberikan pembiayaan modal, berdasarkan UU No. 21 tahun 2008, bahwa perbankan syariah adalah seluruh hal mengenai bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS), meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi perantara, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip syariah, seperti tidak menggunakan konsep bunga dan riba, tetapi menggunakan konsep bagi hasil dan menggunakan akad sewa atau jual beli.
2. BUS dan UUS juga perlu mendorong pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan mengatur nilai return of assets (ROA) dan financing to deposit ratio (FDR), karena variabel-variabel tersebut berpengaruh positif sehingga dapat meningkatkan proporsi pembiayaan modal kerja UMKM.
3. Pemerintah sebagai regulator perlu mendorong pertumbuhan PDB agar perekonomian semakin membaik dan tetap stabil, mengingat produk domestik bruto (PDB) memberikan kontribusi terbesar dalam memengaruhi keragaman proporsi pembiayaan modal kerja UMKM.

Judul Determinan Proporsi Pembiayaan Modal Kerja Sektor UMKM oleh Bank Syariah di Indonesia

Pendahuluan

UMKM dan usaha besar saling melengkapi satu sama lain walaupun pada kenyataannya UMKM lebih berpengaruh dalam menyerap tenaga kerja dan menyumbang pendapatan nasional (Sofyan 2017). UMKM merupakan sektor ekonomi yang memberikan kontribusi sebesar 57,08 persen dari total rasio produk domestik bruto (PDB) dan 53,24 persen dari total perekonomian nasional dalam pembentukan investasi di Indonesia (Darsono & Darwanto 2019). Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2018 dan 2019, jumlah unit UMKM mengalami peningkatan sebesar 1,98 persen. Sektor UMKM banyak menyerap tenaga kerja dan meningkat dari 116.978.631 orang pada tahun 2018 menjadi 119.562.843 orang pada tahun 2019. UMKM juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan PDB yang mengalami peningkatan sebesar 210.541.9 miliar Rupiah atau sebesar 3,68 persen. UMKM bukan hanya memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi, melainkan juga permasalahan dalam perkembangannya. Permasalahan yang dijumpai pada setiap daerah serupa, yaitu modal kerja yang kurang memadai, kualitas sumber daya manusia yang kurang baik, produktivitas dan kualitas produk yang rendah, serta pengetahuan yang juga terbatas (Lubis 2016). Setiawan (2021) menyebutkan bahwa masalah utama adalah keterampilan manajerial dan permodalan yang berdampak terhadap keterbatasan akses dana yang dapat diperoleh dari lembaga keuangan. Salah satu lembaga keuangan yang dapat mengatasi keterbatasan modal kerja dengan memberikan pembiayaan modal untuk UMKM adalah bank syariah (Indrawati & Basuki 2017). Berdasarkan UU No. 21 tahun 2008, perbankan syariah adalah seluruh hal mengenai bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah

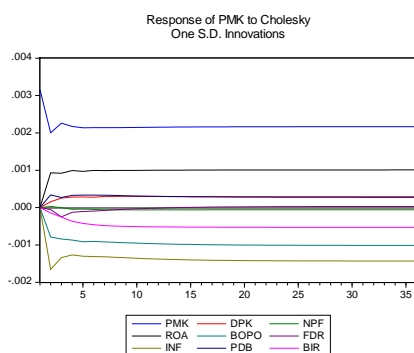
(UUS), meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi perantara, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip syariah, seperti tidak menggunakan konsep bunga dan riba, tetapi menggunakan konsep bagi hasil dan menggunakan akad sewa atau jual beli.

Pembahasan

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan perekonomian nasional, bahkan dunia mengalami resesi. Perekonomian Indonesia sendiri mulai mengalami kontraksi pada triwulan ke-2 tahun 2020 dengan pertumbuhan ekonomi menyentuh angka -5,3 persen (BPS 2023). Kontraksi ini disebabkan oleh kebijakan pembatasan sosial yang berdampak pada penurunan konsumsi rumah tangga, realisasi belanja pemerintah, belanja investasi, dan perdagangan luar negeri. Memburuknya kondisi perekonomian Indonesia akibat pandemi memaksa pemerintah bertindak cepat dengan mengeluarkan berbagai program sebagai upaya meningkatkan kinerja perekonomian nasional pada triwulan berikutnya. Salah satu programnya adalah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN mencakup tiga kebijakan utama, yaitu peningkatan dunia usaha (*supply*), peningkatan konsumsi dalam negeri (*demand*), serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter (Kemenkeu 2020). Program PEN diharapkan dapat meningkatkan penyaluran pembiayaan modal kerja kepada UMKM, meskipun hingga akhir periode penelitian, proporsi pembiayaan modal kerja UMKM tetap mengalami penurunan.

IRF digunakan untuk melihat bagaimana respon dari variabel jika diberikan guncangan dari variabel itu sendiri maupun variabel endogen

lainnya dan berguna untuk menunjukkan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke titik keseimbangan (Firdaus 2020). Penelitian ini menggunakan standar *cholesky decomposition* dalam mengidentifikasi respon proporsi pembiayaan modal kerja UMKM terhadap guncangan yang diberikan oleh variabel proporsi pembiayaan modal kerja UMKM itu sendiri, DPK, NPF, ROA, BOPO, FDR, PDB, INF, dan BIR. Periode waktu yang digunakan pada penelitian ini dalam menganalisis respon proporsi pembiayaan modal kerja, yaitu selama 36 bulan ke depan.



Hasil Analisis IRF

Hasil analisis IRF pada Gambar di atas menunjukkan guncangan pada variabel proporsi pembiayaan modal kerja UMKM akan direspon secara positif oleh proporsi pembiayaan modal kerja UMKM itu sendiri. Guncangan proporsi pembiayaan modal kerja UMKM sebesar satu standar deviasi pada bulan pertama akan mengakibatkan kenaikan proporsi pembiayaan modal kerja UMKM sebesar 0,003160 persen. Bulan pertama merupakan titik respon tertinggi yang diberikan oleh variabel proporsi pembiayaan modal kerja UMKM. Respon mengalami penurunan pada bulan kedua sebesar 0,002001 persen. Respon mengalami kenaikan di bulan ketiga dan menurun kembali di bulan keempat. Respon terus mengalami fluktuasi dari bulan kelima sampai bulan ke-26 dan mencapai keseimbangan jangka panjang dimulai bulan ke-27 dengan kisaran respon sebesar 0,002166 persen.

Faktor internal dan eksternal sangat memengaruhi proporsi pembiayaan modal kerja

pada BUS dan UUS untuk sektor UMKM di Indonesia. Gambar 14 menunjukkan bahwa terdapat respon proporsi pembiayaan modal kerja UMKM terhadap guncangan dari variabel faktor internal (DPK, NPF, ROA, BOPO, dan FDR) dan faktor eksternal (PDB, INF, dan BIR). Gambar 14 menunjukkan bahwa guncangan pada DPK, ROA, FDR, dan PDB direspon positif oleh proporsi pembiayaan modal kerja UMKM, sedangkan NPF, BOPO, INF, dan BIR direspon negatif oleh proporsi pembiayaan modal kerja UMKM hingga akhir penelitian. Berikut ini merupakan penjelasan dari pengaruh guncangan setiap variabel tersebut terhadap proporsi pembiayaan modal kerja UMKM.

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Proporsi pembiayaan modal kerja UMKM pada bulan pertama belum merespon guncangan DPK. Namun, guncangan tersebut mulai direspon pada bulan kedua. Proporsi pembiayaan modal kerja UMKM merespon guncangan DPK secara positif pada bulan kedua sampai bulan ke-36. Guncangan DPK pada bulan kedua meningkatkan proporsi pembiayaan modal kerja sebesar 0,000155 persen. Respon mengalami kestabilan dari bulan ke-23 sampai akhir periode sebesar 0,000289 persen.

Guncangan DPK yang selalu direspon positif oleh proporsi pembiayaan modal kerja UMKM menunjukkan DPK yang meningkat akan menaikkan proporsi penyaluran pembiayaan modal kerja UMKM. DPK sebagai sumber dana terbesar BUS dan UUS berpengaruh positif terhadap proporsi penyaluran pembiayaan modal kerja UMKM. Hal ini sependapat dengan Mishkin (2008), yaitu semakin besar jumlah dana terhimpun, maka semakin besar jumlah pembiayaan/kredit yang dapat disalurkan. Siyamto (2021) berpendapat hal yang sama bahwa penyaluran pembiayaan modal kerja di sektor UMKM dipengaruhi oleh DPK secara positif.

Non Performing Financing (NPF)

Proporsi pembiayaan modal kerja UMKM belum merespon guncangan NPF pada bulan pertama. Namun, guncangan tersebut mulai

direspons pada bulan kedua. Proporsi pembiayaan modal kerja UMKM merespon guncangan NPF secara positif senilai 0,0000296 persen pada bulan kedua. Guncangan pada NPF direspons negatif oleh proporsi pembiayaan modal kerja UMKM pada bulan ketiga sampai bulan ke-36. Guncangan NPF pada bulan ketiga menurunkan proporsi pembiayaan modal kerja UMKM sebesar 0,000016 persen. Bulan ke-11 merupakan titik terendah dari respon yang diberikan proporsi pembiayaan modal kerja UMKM terhadap guncangan NPF, yakni mengalami penurunan menjadi 0,000006 persen. Respon mengalami kestabilan dari bulan ke-24 sebesar 0,0000591 persen.

Guncangan NPF direspons negatif oleh proporsi pembiayaan modal kerja UMKM menggambarkan bahwa kesehatan bank, salah satunya bisa dilihat dari NPF merupakan suatu hal yang penting. Persentase NPF yang tinggi mengindikasikan bahwa bank sedang mengalami penurunan kesehatan bank. Nilai NPF yang melonjak membuat bank mengurangi atau akan menjadi sangat hati-hati jika menyalurkan pembiayaan modal kerja sehingga proporsi pembiayaan modal kerja akan menurun (Kusumawati 2013). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Indrawati dan Basuki (2017).

Return On Assets (ROA)

Proporsi pembiayaan modal kerja UMKM pada bulan pertama belum merespon guncangan ROA. Namun, guncangan tersebut mulai direspons pada bulan kedua. Proporsi pembiayaan modal kerja UMKM pada bulan kedua sampai bulan ke-36 merespon guncangan NPF secara positif. Guncangan NPF pada bulan kedua meningkatkan proporsi penyaluran pembiayaan modal kerja UMKM senilai 0,000933 persen. Respon proporsi penyaluran pembiayaan modal kerja UMKM pada bulan ketiga terus mengalami peningkatan hingga akhir periode yang mencapai 0,001009 persen. Respon mengalami kestabilan dari bulan ke-29 sampai akhir periode sebesar 0,001009 persen.

Guncangan ROA yang selalu direspons positif oleh proporsi pembiayaan modal kerja UMKM menandakan bahwa nilai ROA yang tinggi akan meningkatkan proporsi penyaluran pembiayaan modal kerja UMKM. Hal ini sesuai dengan pendapat Dendawijaya (2009), yaitu nilai ROA yang tinggi menunjukkan semakin tinggi tingkat keuntungan yang bank peroleh dan semakin baik posisi bank dalam menggunakan asetnya sehingga memberi kemungkinan untuk bank agar dapat menyalurkan pembiayaan termasuk pembiayaan modal kerja secara lebih luas. Penelitian Arif dan Nurhikmah (2017) dan Satrio (2020) juga menemukan hal yang sama, yaitu ROA memiliki pengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan modal kerja di sektor UMKM.

Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Guncangan BOPO belum direspons oleh proporsi pembiayaan modal kerja UMKM pada bulan pertama. Namun, guncangan tersebut mulai direspons pada bulan kedua. Guncangan pada BOPO mulai dari bulan kedua sampai bulan ke-36 direspons negatif oleh proporsi pembiayaan modal kerja UMKM. Guncangan BOPO pada bulan berikutnya menurunkan proporsi penyaluran pembiayaan modal kerja UMKM sebesar 0,000787 persen. Respon penyaluran proporsi penyaluran pembiayaan modal kerja UMKM pada bulan ketiga berfluktuasi dan relatif mengalami penurunan hingga akhir periode. Respon penyaluran proporsi pembiayaan modal kerja UMKM pada bulan ke-33 mengalami kestabilan hingga akhir periode sebesar 0,001012 persen.

Guncangan BOPO direspons negatif oleh proporsi pembiayaan modal kerja UMKM menggambarkan bahwa kesehatan bank bisa dilihat dari BOPO merupakan suatu hal yang penting. Rendahnya nilai BOPO menunjukkan bahwa manajemen bank dapat mengelola beban operasionalnya dengan lebih efisien sehingga semakin banyak dana tersedia yang dapat disalurkan melalui penyaluran kredit/pembiayaan

untuk meningkatkan pendapatan (Putri & Suryantini 2017).

Financing to Deposit Ratio (FDR)

Guncangan FDR belum direspon oleh proporsi pembiayaan modal kerja UMKM pada bulan pertama. Namun, guncangan tersebut mulai direspon pada bulan kedua. Guncangan pada FDR mulai dari bulan kedua sampai bulan ke-13 direspon negatif oleh proporsi pembiayaan modal kerja UMKM. Guncangan FDR pada bulan kedua sebesar 0,0000521 persen semakin menurun sampai bulan ke-13 sebesar 0,00000543 persen. Guncangan FDR pada bulan ke-14 sampai akhir periode direspon positif oleh proporsi pembiayaan modal kerja UMKM. Guncangan FDR pada bulan ke-14 menyebabkan kenaikan pada proporsi penyaluran pembiayaan modal kerja UMKM sebesar 0,0000701 persen. Respon proporsi penyaluran pembiayaan modal kerja UMKM pada bulan ke-15 berfluktuasi dan relatif mengalami kenaikan sebesar 0,0000312 persen.

Guncangan FDR yang direspon positif oleh proporsi pembiayaan modal kerja UMKM memperlihatkan bahwa nilai FDR yang meningkat menyebabkan proporsi penyaluran pembiayaan modal kerja UMKM semakin tinggi. Nilai FDR yang tinggi menandakan bahwa bank tersebut memiliki tingkat likuiditas yang rendah karena pembiayaan yang disalurkan lebih besar daripada dana yang diterima (Dendawijaya 2009). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Destiana (2016) dan Satrio (2020).

Produk Domestik Bruto (PDB)

Proporsi pembiayaan modal kerja UMKM belum merespon guncangan PDB pada bulan pertama. Namun, guncangan tersebut mulai direspon pada bulan selanjutnya dengan respon negatif sebesar 0,000339 persen. Bulan ketiga hingga bulan ke-36 direspon dengan positif. Nilai respon berfluktuatif mulai dari bulan ketiga hingga akhir periode, yaitu bulan ke-36. Respon mengalami

kestabilan pada bulan ke-29 sebesar 0,000277 persen.

Guncangan PDB direspon secara positif oleh proporsi pembiayaan modal kerja menggambarkan bahwa meningkatnya PDB akan meningkatkan proporsi penyaluran pembiayaan modal kerja UMKM. Hal tersebut dapat terjadi apabila pendapatan masyarakat dalam suatu negara tinggi, maka tabungan masyarakat tersebut juga akan tinggi. Adanya peningkatan tabungan masyarakat ini diduga akan meningkatkan tingkat investasi (Keynes dalam Sukirno 2005). Tajgardoon (2012) dan Nahar dan Sarker (2016) juga menemukan hal yang sama, jika PDB meningkat, maka akan menyebabkan peningkatan pembiayaan bank syariah yang termasuk di dalamnya pembiayaan modal kerja. Jika PDB mengalami peningkatan, maka tingkat berinvestasi akan semakin tinggi sehingga akan menyebabkan peningkatan permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) pada pembiayaan bank syariah.

Daftar Pustaka

- Arif MN, Nurhikmah I. 2017. Determinan Pembiayaan Bagi Hasil Perbankan Syariah Di Indonesia: Model Regresi Panel. *Al Falah: Journal of Islamic Economics*. 2(1): 1-12.
- Darsono D, Darwanto D. 2019. Strengthening the MSME Through Institutional Cooperation Improvement Between MSME and Sharia Microfinance Institutions (SMFI). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. [diakses 2023 Apr 10]; 17(1): 65. <https://doi.org/10.30984/jis.v17i1.809>.
- Dendawijaya L. 2009. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Destiana R. 2016. Analisis Faktor-Faktor Internal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi*. 2(1): 15-28.

- Indrawati E, Basuki AT. 2017. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Modal Kerja UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode Juni 2014-November 2016). *Journal of Economics Research and Social Sciences*. 1(2): 144-153.
- Kusumawati NN. 2013. Analisis Pembiayaan Sektor Konstruksi Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Al-Muzara'ah*. 1(2):191-203.
- Lubis DS. 2016. Pemberdayaan UMKM Melalui Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Kota Padangsidempuan. *AtTijarah*. 2(2): 270–285.
- Mishkin FS. 2008. *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan* Buku I. Jakarta : Salemba Empat.
- Nahar S, Sarker N. 2016. Are Macroeconomic Factors Substantially Influential For Islamic Bank Financing? Cross-Country Evidence. *IOSR Journal of Business and Management*. 18(6): 20-27.
- Putri IGAPT, Suryantini NPS. 2017. Determinasi Loan to Deposit Ratio pada Bank Campuran di Indonesia. *E-Jurnal Manajemen Unud*. 6(1):204-234.
- Satrio LB. 2020. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Pembiayaan Sektor UMKM oleh Bank Umum Syariah[skripsi]. Bogor(ID). Institut Pertanian Bogor.
- Setiawan I. 2021. Pembiayaan UMKM, Kinerja Bank Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*. 6(2): 263-278.
- Siyanto Y. 2021. Pembiayaan Modal Kerja Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Ditinjau Dari Pengaruh Internal Faktor Bank Syariah di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS*. 4(1): 399–407.
- Sofyan S. 2017. Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam Perekonomian Indonesia. *Bilancia*. 11(1): 33-64.
- Tajgardoon, Gholamreza, et al.. 2012. Is Profitability as a Result of Market Power or Efficiency in Islamic Banking Industry?. *Economics and Finance Review*. 2(5): 1-7.

Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika merupakan upaya mengantarmukakan sains dan kebijakan (science-policy interface) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Media ini dikelola oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (D-KASRA) IPB University. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan IPB University.

Author Profile



Divia Athaya Fairuz Siradju, Alumni Dept. Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB University



Dr. Neneng Hasanah, Dosen Dept. Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB University



Marhamah Muthohharoh, S.E, M.Ec, Dosen Dept. Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB University

ISSN 2828-285X



9 772828 285006



Telepon

+62 813 8875 4005



Email

dkasra@apps.ipb.ac.id



Alamat

Gedung LSI Lt. 1
Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga
Bogor - Indonesia 16680